

Umat Islam, Seribu Tahun Berhenti Berpikir

Dr. Ahmad Syafi'i Maarif, Dosen Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta

Gerakan Politik Islam

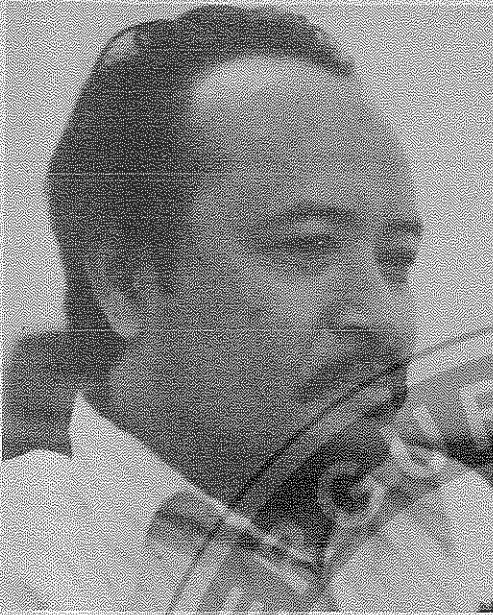
Tanya: Pada masa demokrasi liberal di Indonesia, kita mengenal adanya partai-partai yang secara eksplisit menyatakan dirinya memperjuangkan aspirasi Islami. Konsep ini menegakkan negara berdasarkan Islam merupakan puncak perjuangannya. Sekarang pun masih kita dapati partai Islam sebagai organisasi politik. Masalahnya, mungkinkah menyalurkan aspirasi politik yang sifatnya Islami?

Jawab: Aspirasi Islami bukan hanya disebut-sebut pada masa demokrasi liberal, tetapi sejak 3 bulan sebelum proklamasi. Di depan sidang-sidang persiapan kemerdekaan kelompok ini sudah menyodorkan Islam sebagai dasar negara. Namun semakin dikaji, semakin tidak jelas aspirasi Islami yang diperjuangkan. Sering dikatakan, aspirasi Islami itu menjadikan syari'ah Islam sebagai dasar negara, tapi ternyata menempatkan syari'ah Islam itu ke dalam mekanisme kehidupan politik moderen tidaklah gampang. Sebagai contoh Pakistan sebagai negara Islam pun sampai saat ini masih bingung menerapkan syari'ah dalam kehidupan kenegaraannya. Masalah yang lebih mendasar adalah syari'ah yang mana sebenarnya dimaksudkan? Apakah yang diwariskan para ahli hukum Islam abad pertengahan? Jika diingat bahwa sebagian besar interpretasi para ahli hukum tersebut bertolak dari *ijtihad (independent judgement)*, dengan sendirinya bersifat temporer, terkait dengan zamannya. Para pemimpin Islam masa lampau di Indonesia nampaknya lebih mengutamakan wadah. Mereka bermaksud lebih dulu menegakkan negara berdasarkan Islam secara formal, baru kemudian pelaksanaan syari'ah Islam. Menurut hemat saya, ini terbalik. Isi dasar negara yang sifatnya Islami itu

perlu dipikirkan lebih dulu. Syari'ah sebagai rumusan abad pertengahan itu perlu ditinjau dan diuji secara menyeluruh dan dengan pemahaman utuh kita pada Qur'an.

Selain itu, perlu diingat, Qur'an, menginginkan terciptanya masyarakat yang *egaliter* dengan menjalankan mekanisme *syuro (mutual consultation)*. Aspirasi politik hendaknya bukan melaksanakan syari'ah Islam, tetapi menjalankan kehidupan atas dasar kebersamaan dan musyawarah. Dewasa ini tidaklah mungkin mencari model negara yang benar-benar menjalankan prinsip *egaliter* dan *syuro* di antara negara yang menyebut diri berdasar Islam. Kalau pun dicari hanya ditemui sekitar 50 tahun permulaan Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad, dan pada masa khalifah sahabat Nabi. Seiring dengan meninggalnya khalifah Ali bin Thalib, negara berdasarkan Qur'an pun ikut terkubur. Negara-negara yang muncul belakangan, yang disebut berdasarkan Islam, sesungguhnya telah menyimpang. Arab Saudi dan Brunei misalnya, menjalankan sistem kerajaan. Sistem dinasti tidak dikenal dalam Qur'an. Iran yang muncul belakangan, semula diperkirakan akan menjadi republik Islam yang dapat dijadikan model. Kehidupan kenegaraan yang dilaksanakan di sana semakin jelas menyimpang dari Qur'an setelah Bani Sadr terusir. Pola kehidupan keagamaan yang elitis, dengan kekuasaan para mullahnya dalam kehidupan politik, semakin menimbulkan kekecewaan, apalagi dalam bukunya *Wilaya-i Faqih* yang mengupas teori politik, Khomeini sama sekali tidak menyinggung prinsip *syuro*, itu sebabnya bisa dikatakan, di Iran sedang ditegakkan tirani dengan baju Islam.

Dihubungkan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat ini dianggap sebagai organisasi politik Islam di Indonesia, sejak berdiri sudah tidak sesuai dengan



AHMAD SYAFII MAARIF

prinsip kebersamaan dan syuro. Ia berdiri atas dasar proses dari "atas", bukan dari rakyat. Ditambah lagi dengan pemimpin yang di "drop". Ini sungguh tidak sehat untuk pengembangan kehidupan yang demokratis dengan bertitik berat pada mekanisme yang menjamin partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan politik. Pemimpinnya semakin menjauh dari prinsip "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagaimana diharapkan pembukaan undang-undang dasar kita. Padahal dulu, karena merasa didukung para pemimpinnya partai Islam lebih mantap. Para pemimpinnya punya tanggung jawab terhadap rakyat, karena berakar pada rakyat.

Faktor Pemimpin

T : *Mantapnya partai Islam pada tahun 50-an itu apakah bukan karena cita-citanya untuk membangun struktur kehidupan politik berdasarkan Islam lebih jelas?*

J : Mungkin saja. Tapi saya melihat faktor pemimpin lebih dominan. Mereka demokratis. Bukan hanya pemimpin partai Islam, ketika itu para pemimpin PNI pun demokrat. Setiap pemimpin merasa dipilih rakyat,

dan rakyat pun merasa memilih pemimpinnya. Perasaan ini mendorong adanya tanggung jawab.

Andai pun partai Islam memiliki cita-cita yang terformulasi, dengan pemimpin yang tidak melalui proses demokratis, tanggung jawabnya sulit diharapkan. Saya melihat faktor pemimpin yang punya tanggung jawab lebih penting. Ini hanya dapat muncul melalui proses demokratis. Sayangnya, orang-orang yang berkemungkinan untuk mampu berpikir dan bertanggung jawab, tak dapat muncul. Mudah-mudahan saja Pemilu tahun 1987 yang akan datang, batasan-batasan terhadap pemilih dapat dikurangi.

Cara Kultural

T : *Dalam merealisasikan cita-cita kenegaraan dengan membangun struktur politik yang Islami, nampaknya tak mungkin dilaksanakan. Ada yang menganggap cara hidup yang Islami merupakan pilihan yang lain. Mungkinkah?*

J : Mungkin. Jika melalui struktur politik sudah macet, memang perlu ditempuh cara kultural. Saya melihat cara ini paling *feasible*. Selama ini, secara sporadis, sudah muncul upaya membangun hidup yang Islami, misalnya dengan tumbuhnya remaja mesjid, di lingkungan kampus, dan sebagainya. Sebegitu jauh belum ada koordinasi. Itu sebabnya saya menganggap perlu adanya strategi lebih dulu.

Kalau secara kultural umat Islam sudah bersifat Islami, dengan sendirinya warna politik di Indonesia akan Islami, termasuk di antaranya penafsiran Pancasila dan Undang-undang Dasar '45 akan berisi nilai-nilai Islam.

T : *Lewat pendidikan?*

J : Masalahnya, pendidikan Islam yang bagaimana? Apakah Islam menurut persepsi kita sudah memadai dalam menciptakan hidup yang Islami? Selama Islam belum dirumuskan secara tajam sesuai zaman, andai kata pun di sekolah-sekolah diajarkan 30 persen pelajaran umum dan 70 persen menyangkut Islam, tidak akan ada artinya, selama Islam itu sendiri belum dirumuskan dan

dikaji kembali. Ini menyangkut pengertian kita mengenai manusia yang baik menurut Islam. Kebaikan manusia di sini harus dapat diukur dengan standar apa pun. Apakah kita sudah punya bayangan Islam semacam itu?

Masyarakat Islam tidak boleh bersifat eksklusif. Ia harus bersifat terbuka. Islam diturunkan untuk merombak dunia, untuk menciptakan masyarakat yang egaliter di atas etik yang berasal dari wahyu, bukan hanya mengajarkan agar orang saling menolong, jujur, dan semacamnya. Sebagai ajaran yang utuh, ia harus dapat menjadi satu sistem perilaku. Saya kira, Islam belum pernah merumuskan konsep semacam itu. Jadi perlu merumuskan Islam secara konseptual.

T: Apakah ini berkaitan dengan pemahaman tentang kesalahan dalam Islam?

J: Ya. Pemahaman tentang kesalahan perlu diperjelas. Manusia diturunkan ke dunia untuk menciptakan dunia baru, merombak dunia, menata kehidupan berdasarkan syuro dan kebersamaan. Bukan kesalahan dalam arti sempit berupa pelaksanaan rukun Islam secara formal, atau seperti kehendak aliran sufi yang sangat individual itu. Kesalahan tradisional yakni tekun melaksanakan lima rukun Islam menyebabkan terpisahnya kesalahan dari kehidupan keseluruhan. Orang terpaku pada rukun Islam, sementara ketentuan itu hanya berasal dari Sunnah. Padahal, inti dan semangat Qur'an menuntut manusia untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik, lebih egaliter, lebih berkeadilan, dan sebagainya. Jadi tak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Karena itu diperlukan upaya intelektual untuk melihat relevansi setiap syari'ah. Kalau perlu, syari'ah yang tidak sesuai dengan inti dan semangat Qur'an yang bercita-cita egaliter dan syuro itu disingkirkan. Bila syari'ah yang kita kenal hanyalah merupakan hasil pemikiran ahli hukum Islam abad pertengahan, orang yang hidup sekarang pun dapat berbuat hal yang sama, sebab *ijtihad* dapat dilakukan siapa saja.

Dalam kerangka ini pengertian tentang iman juga perlu diperjelas. Pada dasarnya, iman pada Tuhan selalu dikaitkan dengan

hidup masyarakat yang egaliter, yaitu untuk mengubah kenyataan ke arah hidup yang lebih baik. Jadi pengertian takwa atau intensitas keimanan di sini adalah kemampuan untuk melihat apa yang pantas dan yang tidak pantas sebagai perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan landasan etik berasal dari wahyu Tuhan.

Etik Politik dan Islam

T: Menginginkan kehidupan politik yang baik dengan bertolak dari perilaku manusia yang secara etik baik, tentunya merupakan keinginan dalam sistem apa pun. Lantas bagaimana identitas Islam?

J: Islam mengenal sanksi transendental, yaitu adanya landasan spiritual. Tanggung jawab dunia selalu disertai tanggung jawab spiritual. Jadi kerangka demokrasi liberal tak bisa diterima begitu saja. Misalnya dalam hal-hal prinsipil, meskipun mayoritas menerima, kalau etik transendental yang berkaitan dengan alam setelah kehidupan tak bisa menerima, dengan sendirinya harus ditolak. Melalui proses syuro ada anggapan, hasilnya bukan untuk dunia ini saja, tetapi juga untuk masa setelah kehidupan ini.

Konsep yang jelas memang belum ada, karena umat Islam sudah berhenti berpikir sekitar seribu tahun sejak "pintu" *ijtihad* dinyatakan tertutup pada abad ke-10 atau ke-11 yang lalu. Ini menyebabkan sulit diharapkan adanya pemikiran konseptual. Umat Islam hanya berpedoman secara kaku pada hasil pemikiran dari abad-abad sebelum itu saja. Tak ada usaha mempertanyakan apalagi meninggalkan hasil pemikiran itu. Lebih-lebih, karena Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari sumber-sumber yang sudah dekaden, bukan dari sumber aslinya.

Elitisme dan ijtihad

T: Pada saat ini ada 2 gerakan Islam yang dapat dikatakan besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ada kesan bahwa NU, bersifat elitis, dengan menempatkan kedudukan ulama begitu penting, sampai-sampai untuk bermusyawarah pun menggunakan bahasa Arab, seakan untuk menjadi eksklusif dan jauh dari awam.

Sedang Muhammadiyah terlalu menjauhi politik, dan hanya menitik-beratkan perhatian pada pendidikan formal lewat sekolah-sekolah, dan kegiatan sosial yang sifatnya kedermawanan. Dapatkah kedua gerakan ini diharapkan untuk membawa perubahan ke arah kehidupan yang egaliter itu?

J: Menggunakan bahasa Arab dalam bermusyawarah mungkin hanya untuk mengingatkan, agar memberi perhatian terhadap bahasa asing tersebut. Bagian terbesar masyarakat Indonesia beragama Islam, menggunakan Qur'an yang berbahasa Arab, tetapi di sekolah-sekolah, terutama hanya diajarkan bahasa Inggris. Jadi belum tentu karena sifat elitisnya. Itu dari pandangan positif. Hanya kalau ada kecenderungan elitis di lingkungan NU, itu tidak sesuai dengan Islam. Terlepas dari keadaan itu, saya melihat mulai tumbuh upaya dari generasi yang lebih muda untuk menembus sifat elitis itu. Kalau kecenderungan elitis tetap lebih dominan, tentu saja sulit diharapkan untuk menciptakan dunia baru. Belajar dari sejarah permulaan Islam, kita melihat Islam yang diturunkan itu menolak elitisme. Masa Madinah dan Makkah menunjukkan hal ini. Islam sangat egaliter pada saat itu. Juga prinsip Islam yang mewajibkan setiap orang untuk menyiarkan agama, walaupun hanya mengetahui satu ayat saja, menunjukkan bahwa Islam bukan hanya urusan ulama. Setiap orang harus mengambil peran aktif.

Sejak awal Muhammadiyah menyatakan pintu *ijtihad* selamanya terbuka dengan sumber Qur'an dan Hadist. Di sini kelebihan Muhammadiyah. Tapi sayangnya Islam belum diimplementasikan ke seluruh aspek kehidupan. Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah hanya ditempel-tempelkan ke dalam kurikulum. Sekian tahun Muhammadiyah berdiri, tidak nampak usaha menggali Islam yang sesungguhnya untuk dijabarkan lebih jauh sebagai pedoman perilaku. Jadi di bidang pendidikan kita belum punya strategi yang menyeluruh untuk menegakkan kehidupan yang Islami itu. Kebanyakan pesantren menekankan pada *fiqh*, kecuali bebera-

pa buah yang mulai mengubah orientasinya. Seluruhnya belum punya kerangka strategis, sebab belum dilakukan penggalian Islam yang sesungguhnya. Artinya mencari landasan etik yang berasal dari Qur'an yang diwahyukan. Kalau perlu meninggalkan syari'ah yang berasal dari ahli hukum Islam abad pertengahan itu.

Perlu Gerakan Intelektual

T: *Kalau begitu, di satu sisi umat Islam Indonesia tidak punya landasan konsepsional dalam gerakannya, dan di sisi lain semakin tak mungkin untuk bergerak ke arah struktur politik yang berdasarkan Islam. Lantas bagaimana peran umat Islam di negeri ini?*

J: Bagi saya, umat Islam saat ini perlu melakukan gerakan intelektual yang menggalikan semangat dan inti Islam secara intelektual melalui Qur'an. Di sini kita harus dapat membedakan Islam cita-cita dengan Islam sejarah, sebagaimana saya ungkapkan dalam buku *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Lepenas, 1983). Kita jangan segan-segan membuang Islam yang berkembang dalam sejarah, dan berani menggunakan akal kita menggali Qur'an dan Hadist untuk mendapatkan kerangka etik untuk perilaku kemasyarakatan kita.

Melalui landasan perilaku ini dengan sendirinya kita tidak perlu mempermasalahkan dasar negara. Yang penting, bagaimana melaksanakan ajaran Islam yang sifatnya egaliter dan *mutual consultation* itu dalam kehidupan masyarakat, tanpa mengubah dasar dan struktur negara yang Pancasila. Kalau umat Islam lebih strategis, yaitu mengutamakan penataan perilaku yang sesuai dengan etik Islam sebagaimana diinginkan Qur'an, jadi bukan dengan syari'ah yang formal seperti dikenal selama ini, tentulah pihak-pihak non-Islam pun dapat menerimanya. Sebagai ilustrasi, kita tidak bisa mengatakan Pakistan lebih baik dari India, karena berdasarkan Islam formal. Tapi kita perlu melihat sejauh mana semangat egaliter dan syuro dicerminkan dalam praktek kenegaraan.